

Pengkajian Transdisipliner dalam Ilmu Sosial di Indonesia

Mubyarto^{)}*

Masyarakat ilmuwan adalah juga pejuang untuk memajukan bangsanya. Di bidang apapun ilmuwan selalu dihadapkan pada pilihan yang kadangkala amat sulit. Di zaman pergerakan mungkin batas antara yang dan tidak lebih mudah dilihat, sehingga banyak pejuang masuk penjara tanpa rasa salah sedikitpun, lebih-lebih zaman pembangunan, tanggung jawab ilmuwan terasa lebih sulit didefinisikan. Para 'pejuang' dalam ilmu ekonomi pertanian pernah berjuang keras mempergunakan argumentasinya untuk membela keadilan, yaitu menahan proses pemiskinan petani karena jatuhnya harga gabah yang melebihi kewajaran (1968 - 1969). Petani yang pada waktu itu sedang dalam proses mengadopsi bibit unggul padi IR 5 dan IR 8 (PB 5 dan PB 8) sangat perlu dibela secara ekonomi dan politik. Jika tidak dibela petani akan dirugikan, dan negara juga dirugikan bila akhirnya petani benar-benar enggan atau menolak menanam padi unggul yang produktivitasnya luar biasa tinggi dibanding bibit lokal, meskipun rasanya kurang enak.

Hasil perjuangan para ilmuwan ekonomi pertanian ini yang tersebar di perguruan tinggi, di pemerintahan maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat, akhirnya terlihat dalam bentuk penetapan

harga dasar gabah kering berdasarkan Rumus Tani yang menjadi terkenal. Dalam Rumus Tani ditetapkan harga pupuk urea tidak boleh lebih dari dua kali harga gabah, atau secara kasar harga 1 kilogram pupuk urea harus sama dengan harga 1 kilogram beras. Harga dasar gabah ini sampai sekarang setiap tahun ditinjau kembali sesuai laju inflasi, sehingga petani padi berarti selalu dilindungi dari erosi nilai tukar yang merugikan mereka. Namun, perjuangan ilmuwan ekonomi pertanian ini tidak semuanya berhasil, bahkan gagal secara mencolok dalam perjuangan membela kepentingan petani tebu yang nota bene pada umumnya adalah petani padi juga.

Sejak Inpres No. 9/1975 yang dalam konsiderannya amat mulia, yaitu menjadikan petani "tuan di tanahnya sendiri", petani tebu dirugikan "secara berkelanjutan". Para pejuang ekonomi pertanian tidak pernah kendor mengadakan penelitian-penelitian dan berusaha meyakinkan betapa inpres ini tidak mungkin atau amat sulit menguntungkan petani dan mencapai tujuannya. Dua sebab utama yang menghambat adalah kenyataan pemilikan tanah yang sudah amat kecil, mendekati gurem, dan tebu adalah tanaman

^{*)} Penulis adalah Asisten Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Ketua Bappenas, Guru besar Fakultas Ekonomi Gadjah Mada Yogyakarta, Anggota AIPI Komisi Ilmu-ilmu Sosial serta mantan Kepala P3PK UGM.

perkebunan, bukan tanaman pertanian rakyat, kecuali di beberapa wilayah tebu rakyat tradisional seperti Malang Selatan, Kediri, atau Pati. Padahal sasaran utama tanaman TRI adalah tanah-tanah sawah yang merupakan gantungan petani untuk menghasilkan pangan bagi keluarganya.

Demikian setelah 25 tahun PJP I, dan 50 tahun kemerdekaan Indonesia, para ilmuwan ekonomi pertanian patut mawas diri secara kritis, mengapa perjuangan mereka bisa berhasil secara gemilang, sehingga swasembada beras tercapai setelah 15 tahun diusahakan (1969 - 1984), tetapi telah gagal total dalam hal TRI, sehingga setelah 20 tahun sistem TRI ini berjalan, industri gula nasional dalam kondisi amat menyedihkan dan diramalkan berantakan pada awal abad XXI. Dimana letak kesalahan perjuangan mereka? apakah ada kesalahan strategi atau kesalahan taktik? atau apakah "musuh terlalu kuat", sehingga dengan perjuangan habis-habisanpun memang "peperangan" tidak dapat dimenangkan.

Adalah tidak mungkin musuh disalahkan Yang dapat dan harus dilakukan adalah koreksi diri. Dengan koreksi diri yang sungguh-sungguh diharapkan pada abad XXI nanti para ilmuwan, yang pasti akan dihadapkan pada perjuangan yang lebih berat, dapat menemukan strategi dan taktik untuk memenangkannya. Salah satu kritik diri barangkali adalah terhadap keengganan para ilmuwan untuk bersikap rendah hati. Lawan dari sikap rendah hati adalah keangkuhan ilmiah, yaitu mengagungkan ilmu atau cabang ilmunya sebagai yang paling hebat, sehingga menutup diri terhadap kemungkinan pendekatan interdisipliner atau transdisipliner. Sosialisasi ilmu adalah perlu untuk semakin

tajam menganalisis masalah yang dihadapi. Tetapi spesialisasi yang terlalu jauh sehingga menutup kemungkinan kerjasama dengan ilmu atau cabang ilmu lain hanya akan merugikan. Dalam kasus yang kita sebut di atas, jangan-jangan ilmu ekonomi pertanian di Indonesia cenderung terlalu sempit fokus perhatiannya, atau lebih mementingkan kecanggihan peralatan-peralatan analisis dengan mengabaikan cabang-cabang ilmu sosiologi, antropologi dan politik, atau sejarah dan etika, sehingga penemuan-penemuan dan penerbitan-penerbitannya sama sekali tidak mampu menyentuh akar permasalahan. Akibatnya jelas para penentu kebijaksanaan tidak pernah tersentak oleh argumentasi para ilmuwan ekonomi pertanian dan tentu saja tidak terdorong secara sungguh-sungguh mengkaji ulang aneka kebijaksanaan yang mungkin keliru.

Dalam pada itu, di kalangan ilmuwan sosial Indonesia selalu ada perasaan bahwa upaya pengembangan ilmunya tidak berjalan lancar atau bukan terasa sama sekali "mandeg" bila dibandingkan dengan negara-negara maju, atau bahkan juga dibandingkan dengan beberapa negara maju tetangga di Asia Tenggara. Perasaan demikian biasanya muncul pada saat ilmuwan sosial Indonesia bertemu dengan rekan-rekannya di luar negeri dalam forum-forum seminar, atau dengan membaca artikel-artikel ilmiah dalam jurnal-jurnal. Benarkah perasaan yang demikian? Dan jika benar apakah sebabnya?

Clifford Geertz, seorang antropolog Amerika yang namanya sangat dikenal di Indonesia melalui bukunya *Involusi Pertanian* (disamping bukunya *Involusinya Pertanian of Java*) menuliskan kesan menarik tentang para sarjana dan ilmuwan sosial

Indonesia sebagai berikut :

so many people have nineteen jobs ..
Everybody who's any good is just divide into
fifty parts, with no possibility of sustained
work...

You had a lot of Doctorandus graduates
who really were smart, but didn't know
anything about research.¹

TEORI EKONOMI DUALISTIK DAN ILMUWAN INDONESIA

Meskipun bagi sementara ilmuwan ekonomi Indonesia teori dualisme (ekonomi dan sosiologi) Boeke sudah dianggap "kuno" atau bahkan dianggap "sudah selesai", namun dalam kenyataan sulit dikatakan demikian. Memang banyak ekonom Neoklasik bisa dengan bangga mengatakan bahwa kemajuan ekonomi Indonesia dalam 20-25 tahun terakhir hanya membuktikan secara teramat jelas bahwa teori-teori ekonomi Neoklasik Barat benar-benar "berjalan" atau "bisa diterapkan" secara normal. Berbagai kebijaksanaan ekonomi ala Neoklasik yang dipelajari oleh para teknokrat ekonomi dan yang belajar di negara-negara Barat khususnya di Amerika Serikat, dianggap benar-benar "sesuai buku teks", tanpa diperlukan perubahan-perubahan apapun. Maka hal ini berarti bahwa "terbukti teori Boeke memang salah". Dan jelaslah bahwa dapat dikatakan "seluruh teori ekonomi Barat bersifat universal, berlaku dimana-mana, dalam masyarakat apa saja, kapan saja, di Barat maupun di Timur". Benarkah demikian?

Adalah penulis-penulis muda Australia yang pada tahun 1980 penulis berbagai artikel hasil penelitian mereka tentang aneka sektor di Indonesia (Garnaut & McCawley

1980). Para penulis muda ini hampir tanpa kecuali menyimpulkan masih relevannya teori Boeke tentang dualisme ekonomi, sosiologi, dan teknologi. Terbukti dalam kenyataan empirik pasar tenaga kerja, industri-industri tekstil, pengangkutan, perkapalan, keuangan dan kelembagaan pedesaan, selalu bisa ditemukan adanya dua atau lebih subsistem ekonomi yang hidup secara bersamaan, tanpa jelas-jelas saling mematikan. Dengan melalui pengungkapan data-data empirik, para peneliti muda dari Australia ini ingin membuktikan dan mencoba menerapkan mengapa kebijaksanaan ekonomi tunggal tidak mengakhiri, tetapi bahkan memperluas jurang perbedaan antara sektor modern dan sektor tradisional, antara sektor *Paradoxically, Boeke's theme has been taken up 20 years later by writers concerned with the failure of neoclassical mode to explain the perpetuation of low wage segments in modern capitalist economies* (Chris Manning, 1980, p.307).

Meskipun demikian, Chris Manning tidak sepenuhnya tidak sependapat dengan Boeke tentang sifat dualisme dalam pasar tenaga kerja yang dikatakan : *Unlikely to be dualistic, but rather differentiated according to the range in technologies .. foreign investment contributes further to labour market segmentations*

dan karena segmentasi pasar yang amat jelas ini, maka disimpulkan: *Although we have stressed that the division are not merely dualistic, a dualistic framework at least may be required*

1) Clifford Geert, (1988), *Recollections of An Itinerant Carer*, BIES, Vol 29, No. 3 Desember, hal 42-43

for a realistic analysis of the overall effects of such policy changes (Manning, *ibid*, hal 316)

Ross Mcleod yang membahas dualisme dalam pasar uang mengeluh sebagai berikut : ... *the question of whether the informal sector should be promoted is at best forgotten. At worst, one the technique of promoting the formal sector is to suppress the informal sector* (Mcleod, 1980 hal. 326)

Howard Dick, yang meneliti industri perkapalan antarpulau sejak jaman penjajahan membuat pengamatan menarik dengan memulai pertanyaan sebagai berikut : *Is dualism to explain or to be explained ? Lack of agreement on such fundamentals may account for much of the confusion surrounding use of the term* (Dick, 1980, hal. 349). Selanjutnya disimpulkan. *To say loosely that introduction of these new technologies resulted in technological dualism is merely to state the obvious. The important question is what determined the rate and nature of the spread of these new technologies..... The theory of technological dualism provides a neat rationalization of how different technologies may coexist but it does not constitute an explanation of the phenomenon* (Dick, *ibid*).

Pada tahun 1979 pada saat mengucapkan pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Ekonomi di UGM, kami mempertanyakan (kembali) penerapan teori-teori ekonomi Neoklasik Barat di Indonesia. Memang benar teori-teori tersebut bisa diterapkan, dan hasilnya sesuai harapan. Artinya, hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang amat mengesankan (7,8% per tahun selama pelita I dan II, 1969-1979) memang boleh kita percaya merupakan hasil penerapan kebijaksanaan ekonomi konvensional ala Barat dengan merangsang bekerjanya mekanisme pasar bebas dan membuka kesempatan luas bagi para

penanam modal, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Bahkan ada kesan teori-teori pertumbuhan ekonomi telah bekerja secara terlalu bagus bagi perekonomian Indonesia.

Namun, mereka yang berpendapat demikian biasanya dengan sadar enggan membahas (secara serius) permasalahan distribusi pendapatan dan keadilan dalam proses distribusi itu, yang pada umumnya dianggap bukan urusan mereka. Bagi mereka yang sudi memikirkannya, mengatakan bahwa permasalahan pemerataan dan keadilan distribusi perlu dipikirkan kemudian, yaitu setelah pertumbuhan itu terjadi. "*One thing at a time*", kata mereka. Dan mereka kembali menunjuk pada teori "*trickle down*" yang menyatakan bahwa "pada waktunya nanti" akan terjadi perembesan ke bawah dan akan terjadi pemerataan "dengan sendirinya", jika pertumbuhan ekonomi memang benar-benar telah berhasil.

Berbeda dengan pendapat yang terakhir ini, kami menyatakan dalam pidato pengukuhan tersebut (1979) bahwa teori-teori Neoklasik Barat tersebut memang cocok untuk menjadi landasan kebijaksanaan pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak cocok untuk melandasi kebijaksanaan pemerataan hasil-hasil pertumbuhan ekonomi tersebut. Thesis inilah yang kami kembangkan lebih lanjut pada tahun 1980 dalam buku kami *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Keadilan*, dimana kami mengusulkan agar ilmuwan ekonomi tidak menghindar dari pembahasan masalah keadilan. Apabila ilmu ekonomi masih termasuk ilmu sosial, maka adalah wajar apabila ia tidak menutup mata terhadap meningkatnya ketimpangan ekonomi dan sosial setelah pertumbuhan

ekonomi. Adalah lebih tepat dan manusiawi bagi para ilmuwan ekonomi untuk tidak menduga bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi lebih-lebih yang melampaui target, juga jangan-jangan karena pengorbanan mereka yang lemah dan miskin, yang dalam proses pembangunan ekonomi telah terkorbankan. Artinya, kebebasan bekerjanya sistem pasar, menurut teori (Neoklasik) ini, mungkin harus berarti tergusurnya mereka yang tidak efisien yang dalam hal ini sama dengan yang kecil dan lemah. Dengan perkataan lain demi pertumbuhan ekonomi bangsa, dianggap tidak pada tempatnya kita mentoleransi inefisiensi dari usaha ekonomi secara kecil-kecilan, lebih-lebih, dalam masa kini, kita menghadapi era globalisasi yang menuntut daya saing tinggi di kancah persaingan internasional.

Demikian perkembangan teori ekonomi sebagai ilmu sosial di Indonesia dewasa ini, belum menentramkan. Sebagai ilmu yang bertugas menjelaskan aneka fenomena ekonomi dan sosial mungkin sudah cukup memadai. Namun sebagai ilmu pengobatan (*prescriptive*) untuk memerangi kemiskinan dan keterbelakangan, serta mengatasi ketidakadilan, kiranya masih sangat jauh dari misinya. Dan kecenderungan para ilmuwan ekonomi untuk memandang rendah ilmu-ilmu sosial non ekonomi lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan kemajuan perkembangan ilmu ekonomi sendiri. Berbagai tantangan pembangunan bangsa di masa kini dan masa depan akan lebih mudah diatasi apabila ilmuwan ekonomi lebih bersedia mengadopsi pendekatan multidisipliner dan transdisipliner, yang berarti kesediaan mengurangi perasanaan

fanatisme dan superiornya terhadap disiplin-disiplin lain di luar ilmu ekonomi.

EKONOMI PERTANIAN DAN STUDI PEDESAAN

Meskipun terdapat hambatan-hambatan analitik dan metodologik bagi ahli-ahli ekonomi pertanian untuk mempelajari perekonomian pedesaan, namun mereka secara telaten dan sistematis terus menerus bekerja melaksanakan tugas dan misinya. Kelompok Survey Agro (SAE)²⁾ kelompok yang mampu menghimpun tenaga-tenaga peneliti tangguh ini. Hasil studi ekonomi pedesaan yang dilakukan telah terbit dalam bentuk laporan penelitian komprehensif berjudul *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Indonesia* yang disunting oleh Faisal Kasryno.

Pada bab kerangka Analisis Ekonomi Pembangunan Pedesaan, Faisal Kasryno secara jelas menunjukkan peran ahli-ahli ekonomi pertanian dalam membantu memecahkan masalah-masalah pedesaan. Misalnya, ditegaskan bahwa analisis ekonomi pedesaan tidak dapat menggunakan unit orang, tetapi pada unit rumah tangga (*household*). "Kegiatan produksi konsumsi dan penanaman modal pada masyarakat pedesaan ditentukan oleh keluarga secara bersama"³⁾ Karena unit analisis adalah beberapa orang dalam satu

2) Dalam restrukturisasi Departemen Pertanian secara bertahap sejak tahun 1976, kelompok ini bergabung ke dalam Pusat Penelitian Ekonomi Pertanian, dalam lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian.

3) Faisal Kasryno (ed), (1984) *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Indonesia*, Jakarta Yayasan Obor Indonesia.

keluarga, dan mereka masing-masing bergiat dalam aneka rupa kegiatan ekonomi, maka analisis ekonomi murni yang spesialisik jelas tidak akan mencukupi. Hubungan-hubungan teknik, ekonomi dan sosial dalam produksi, pemasaran serta konsumsi dari masing-masing cabang kegiatan ekonomi, akan cenderung berbeda satu sama lain, belum termasuk faktor-faktor kelembagaan yang kadang-kadang lebih besar lagi peranannya.⁴⁾

Demikianlah ekonomi pertanian yang diterapkan dalam studi pedesaan akan harus berciri ekonomi kelembagaan. Meskipun pendekatan ini sudah cukup lama dikembangkan oleh beberapa tokoh ekonomi seperti Gunnar Myrdal dan Kenneth Parsons (atau Clarence dan Thorntein Veblen sebelumnya), tokoh bagi para peneliti muda Indonesia harus dianggap satu pendekatan yang relatif baru.

Ekonomika kelembagaan berbeda dengan pendekatan ekonomika neoklasik konvensional dalam penolakannya pada analisis yang terlalu mengandalkan pasar persaingan bebas, yang dalam kenyataannya memang sukar ditemukan bentuk murninya pada ekonomi pedesaan. Kelembagaan pedesaan dapat berupa kelembagaan penguasaan tanah, kelembagaan hubungan kerja, dan kelembagaan perkreditan. Dengan kurang berkembangnya ekonomi pasar di pedesaan maka hubungan kelembagaan ini memegang peranan penting dalam transaksi, baik untuk faktor produksi maupun untuk produknya. Potensi pasar yang relatif kecil, adanya fluktuasi musiman kegiatan pertanian, serta besarnya resiko, menyebabkan biaya untuk memperoleh informasi dan biaya transaksi menjadi lebih besar dibanding dengan keadaan ekonomi

di perkotaan. Keadaan inilah yang menyebabkan kurang berkembangnya ekonomi pasar di pedesaan.⁵⁾

Menunjuk kembali kepada keprihatinan yang mendalam dari D.H. Penny tentang masalah keberlakuan validity teori ekonomi pasar "Barat", baik kiranya dikutip peringatan Penny tentang peranan faktor kebudayaan dalam ekonomi pedesaan Indonesia. *Indonesia adalah suatu negara dengan kebudayaan beraneka ragam dan karena itu diperlukan banyak cara untuk memecahkan masalah tentang alokasi sumber-sumber secara efisien. Penelitian ekonomi Indonesia yang mengabaikan peranan faktor-faktor kebudayaan yang khas kurang berharga atau bahkan memberikan yang keliru.*⁶⁾

Menganggap penting faktor kelembagaan dalam studi ekonomi pedesaan tidaklah berarti mengecilkan arti peranan sistem pasar itu sendiri. Berbagai penemuan teknologi dan pengenalannya pada masyarakat pedesaan berdasarkan penelitian ternyata merasuk ke pedesaan melalui mekanisme pasar dan mekanisme harga. Misalnya, bibit padi unggul dengan hasilnya yang relatif kurang enak, mula-mula lambat penerimaannya, karena (atau

4) Semua hubungan ini akhirnya menunjukkan bahwa asas optimalisasi yang harus kita tegakkan harus meliputi wawasan komunitas wilayah, yang merupakan satu kesatuan ekonomi dimana asas skala ekonomi dapat ditegakkan di pedesaan

5) Faisal Kasryno, op. cit D.H. hal 28

6) Masri Singarimbun dan D.H. Penny, (1973) *Population and Poverty in Rural Java; Some Economic Arithmetic from Sriharjo*, Ithaca : Cornell International Agricultural Development, . Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Sulaeman Krisnandhi dengan judul *Penduduk dan Kemiskinan : Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa*, Jakarta : Bharata karya Aksara, 1976, hal. 166-167

karenanya) harga jualnya beberapa puluh persen dibawah harga bibit lokal yang sudah dikenal sebelumnya. Perbedaan harga ini ternyata semakin lama semakin kecil, sehingga akhirnya adopsi petani berjalan dengan laju yang semakin cepat.

Dalam hal upah tani dan kesempatan kerja bagi anggota keluarga tani, peranan "permintaan dan penawaran" atau peranan "mekanisme pasar" nampak cukup besar. Misalnya hal ini dibuktikan oleh tinggi mobilitas tenaga kerja yang untuk sebagian besar diterangkan oleh perbedaan tingkat upah di pedesaan dan perkotaan. Inilah salah satu keterangan mengapa ada "permintaan" besar atas traktor pertanian di pedesaan, meskipun laporan statistik menunjukkan masih besarnya pengangguran tersembunyi di desa. Memang meskipun ada semacam pengangguran di pedesaan, tetapi permintaan tenaga kerja dari pemilik tanah sedang dan kecil hanya merupakan "permintaan potensial", karena permintaan ini tidak disertai penawaran tingkat upah buruh tani yang memadai yang "bersaing" dengan tingkat upah kota-kota di dekatnya. Bagi para pemilik tanah di pedesaan, tenaga kerja yang ada dianggap terlalu "jual mahal" (Jawa: *ngangkrik-angkrik*), sehingga bagi petani yang mampu, dan mendapat tawaran harga traktor yang menarik, penggunaan traktor merupakan satu alternatif yang sering ditempuh.

Ahli-ahli peneliti ekonomi pertanian tentu saja tidak berhenti di sini. Dalam mencoba "menerapkan" analisisnya pada strategi pembangunan pertanian alternatif, ia akan mempertanyakan apakah pembangunan yang mampu menutup kesenjangan tersebut? Di sinilah peranan yang jelas dari para peneliti ekonomi

pertanian yang serius. Akan terbukti bahwa rendahnya upah buruh di pedesaan atau lemahnya permintaan tenaga kerja merupakan akibat langsung dari "rendahnya" harga hasil-hasil pertanian. Rendahnya harga hasil pertanian menyebabkan terhambatnya peningkatan pendapatan pertanian (petani), dan ini pada gilirannya menghambat kemungkinan kenaikan upah buruh tani.⁷⁾

Apabila kita meninjau dari segi buruh tani atau tenaga kerja, maka keadaan "marjinal" di dalam pasar tenaga kerja pedesaan memaksa mereka berfikir keras untuk mendayagunakan tenaga kerjanya secara efektif dan efisien. Mereka akan menjadi lebih dinamis dan selalu mencari kesempatan-kesempatan ekonomi yang terbuka di mana saja. Tingkat pendapatan tenaga kerja dan pendapatan rumah tangga ditentukan oleh tujuh faktor berikut: (a) jumlah angkatan kerja produktif; (b) tingkat pendidikan; (c) tingkat mobilitas tenaga kerja; (d) kepadatan agraris; (e) tingkat upah di luar pertanian; (f) tingkat teknologi; dan (g) tingkat penguasaan harga non tanah.

PERKEMBANGAN ILMU DAN FAKTOR-FAKTOR SOSIAL BUDAYA

Kasus yang amat menarik dalam perkembangan ilmu politik diilustrasikan oleh ancaman tuntutan hukum Probosutedjo terhadap penulis buku *Bisnis dan Politik*, Yahya Muhaimin. Tuntutan atas protes ini, berawal dari penerbitan buku disertai yang sebagian isinya dianggap

7) Faisal Kasryno, Djoko Budianto dan A.T. Birowo, "Agriculture Linkages and the Role of Agriculture in Overall Economic Development"

"tidak benar", "menyesatkan", atau bahkan "mencemarkan nama baik". Memang masalahnya menjadi lebih menarik karena Yahya Muhaimin mengakui bahwa ia sudah menduga penerbitan disertasinya dalam bahasa Indonesia "akan menimbulkan reaksi" dari pihak-pihak yang dibicarakan dalam buku itu. Pengakuan yang demikian tidak perlu diartikan sebagai kekeliruan fatal dari penulis buku, tetapi harus diartikan bahwa perkembangan ilmu kadang-kadang "tidak sejalan" dengan faktor-faktor sosial budaya yang ada dan berkembang dalam masyarakat.

Dari segi penulis buku bisa diajukan keluhan, bagaimana ilmu sosial bisa berkembang di Indonesia, jika perilaku bisnis seorang pengusaha tabu untuk analisis secara ilmiah. Apakah dalam hal yang demikian bisa diambil jalan tengah, misalnya dengan cara membahas permasalahan tanpa menyebutkan nama pengusaha yang bersangkutan? Namun yang juga menjadi masalah di sini adalah apakah menganalisis masalah perilaku bisnis seorang pengusaha memang wajar (atau cukup ilmiah) tanpa ada keharusan pengenalan secara pribadi si pengusaha oleh penulisnya. Dengan pengenalan secara pribadi, maka mungkin sekali permasalahan menjadi lebih jelas dan kesimpulan menjadi jauh lebih menakutkan. Hal ini menjadi amat penting dan relevan bila ternyata keberatan Probosutedjo memang lebih terletak pada kekeliruan atau ketidaktepatan datanya, dan bukan pada "bisa tidaknya" masalahnya dibahas secara ilmiah. Ini penting karena ada kekhawatiran bahwa memang penerimaan sebuah disertasi sebagai karya ilmiah kadang-kadang lebih banyak ditekankan pada "kewajaran"

prosedur dan bukan pada akurasi datanya. Masalah yang dihadapi oleh ilmu-ilmu sosial adalah justru pada hal-hal demikian ini, yaitu pada "obyek" penelitian yang adalah manusia biasa, yang bisa dengan mudah tidak setuju pada kesimpulan lugas yang diambil seorang peneliti.

Masalah lain yang lebih bersifat makro dan selalu aktual, bisa diberikan dalam penelitian yang menyangkut kemiskinan, meskipun hal ini tidak menyangkut perorangan. Pada tahun 1973 D.H. Penny dan Masri Singaribun mengadakan penelitian tentang penduduk dan kemiskinan di Sriharjo Imogiri, Yogyakarta. Hasil penelitian ini batal diterbitkan di Indonesia karena dengan penerbitan hasil penelitian tersebut pada waktu itu, dikhawatirkan penulisnya "akan menghadapi kesulitan". Penerbitan hasil penelitian ini kemudian dalam bahasa Indonesia setelah suasana berubah, yaitu setelah masalah kemiskinan dibahas di mana-mana, termasuk Bank Dunia yang banyak membantu dana-dana pinjaman kepada Indonesia, dianggap "tidak apa-apa". Bahkan beberapa tahun kemudian pemerintah Indonesia mempunyai program-program khusus memerangi kemiskinan dan semua pihak dianjurkan untuk "tidak berusaha menutup-nutupi kemiskinan".

Demikian banyak sekali "kendala" pengembangan ilmu sosial di Indonesia, dan kendala-kendala tersebut tidaklah hanya terdapat di negara-negara sedang berkembang saja. Memang harus diakui masalahnya jauh lebih kompleks di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun tidak berarti para ilmuwan sosial harus berkecil hati, lebih-lebih bersikap

pasrah. Justru sebaliknya, kendala-kendala pengembangan ilmu sosial ini harus dianggap "tantangan" yang hanya bisa diatasi melalui penelitian-penelitian yang lebih tekun di lapangan.

DAYA CIPTA ILMU

Apabila kita berbicara tentang perkembangan ilmu maka para pengembangnya pasti memerlukan iklim yang merangsang daya ciptanya. Iklim yang merangsang dan terpadu dalam struktur sosial dan tradisi budaya suatu bangsa akan menghasilkan jiwa eksploratif dan jiwa kreatif dari para ilmuwannya.⁸⁾

Apakah perguruan tinggi kita sudah mampu menciptakan suasana yang subur bagi eksplorasi dan kreasi ilmuwan sosial kita? Sebagaimana disinggung oleh Clifford Geertz di atas, pemahaman para sarjana kita terhadap penelitian-penelitian bagi pengembangan ilmu sangat kurang, lebih-lebih dalam suasana tugas ganda (termasuk yang sudah senior sekalipun).

Dalam keseluruhan proses penelitian bagi perkembangan ilmu yang bobot keingintahuannya (*curiosity*) sangat besar, maka metode berfikir skeptik, analitik dan kritik harus selalu diterapkan. Semangat dan metode berfikir dan berkarya yang demikian inilah yang sering sulit diterapkan bukan saja karena disiplin pribadi yang kurang kuat, tetapi kadang-kadang juga tidak didukung oleh struktur dan iklim sosio politik yang ada. Inilah fenomena yang menerangkan mengapa diperlukan tenggang waktu tertentu sebelum suatu topik sosial "bisa diteliti", atau hasil penelitian tertentu "bisa diterbitkan" seperti kasus penelitian tentang kemiskinan yang telah diuraikan di atas.

Dalam Kongres Kebudayaan 1991 disoroti kaitan antara tatanan sosial budaya dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Tidak sembarang tatanan sosial budaya cocok buat perkembangan ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi hanya dapat tumbuh dan berkembang pada tatanan sosial budaya tertentu saja. Sebagai masalah yang harus dijawab, pertanyaan besar yang kita hadapi adalah, termasuk yang manakah gerangan tatanan sosial budaya kita yang ada sekarang? Yang mengherankan dengan kesadaran ini adalah kemiripan perubahan budaya dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Itulah perubahan yang lebih terkait dengan penemuan dan pemecahan masalah. Yang terpenting adalah daya cipta, untuk menemukan masalah, kesempatan mencoba pemecahannya, kemungkinan dan pembetulan-pembetulanannya (Kompas, "Tajuk Rencana", 31 Oktober 1991).

Demikian bangsa Indonesia dewasa ini memerlukan dukungan ilmu dan teknologi untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Namun, rupanya proses perkembangan ilmu dan teknologi ini cukup terhambat oleh aneka faktor sosial budaya yang sulit berkembang. Faktor-faktor sosial budaya ini banyak yang harus benar-benar diatasi lebih dahulu agar proses tinggal landas pembangunan nasional bisa terlaksana.

PROSPEK PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI

Meskipun sudah jelas perguruan tinggi kita mempunyai misi pengembangan

8) J.B. Mangunwijaya, (1991), "Daya Cipta ilmu dan Teknologi dalam Pertumbuhan di Indonesia", *Kongres Kebudayaan*, hal. 1

penelitian dalam Tri Dharmanya, namun amat nampak bobot yang lebih besar diletakkan pada misi pertama, yaitu pengajaran yang dilaksanakan oleh fakultas-fakultas dan jurusan-jurusan dalam fakultas. Adapun mengapa dharma penelitian kurang diprioritaskan memang tidak terlalu sulit dipahami, karena derajat sarjana bukanlah derajat penelitian. Sampai dewasa ini universitas didirikan terutama untuk menghasilkan (S1) dan tidak untuk menghasilkan peneliti yang tangguh. Bahwa dewasa ini derajat S2 pun lebih dianggap sebagai derajat tambahan setelah S1, dan bukan derajat penelitian, meskipun keharusan penulisan thesis S2 seharusnya memerlukan penelitian mandiri.

Dalam pada itu lembaga-lembaga atau pusat-pusat penelitian di universitas menggantungkan tenaga penelitiannya pada dosen fakultas-fakultas yang tugas utamanya adalah mengajar dan kenaikan pangkatnya pun terutama berdasar tugas-tugas mengajar. Mengapa pusat-pusat penelitian tidak dikembangkan melalui pengangkatan tenaga peneliti yang tidak harus menjadi dosen pengajar di fakultas? Hal ini penting untuk dipikirkan, karena bagaimanapun perkembangan ilmu tidak mungkin terjadi tanpa penelitian. Agar ada upaya peningkatan penelitian berhasil, maka sangat diperlukan perangsang bagi peneliti untuk melakukan penelitian-penelitian mandiri.

Apakah mungkin dari penelitian dengan pihak ketiga dihasilkan karya-karya hasil penelitian yang bermutu dari aspek pengembangan ilmu? Mungkin saja. Yang penting adalah agar para peneliti di pusat-pusat penelitian memperoleh peluang besar untuk menerbitkan karya-karya dan

penerbitan-penerbitannya dimulai dan dihargai sebagai karya-karya hasil penelitian.

Ilmu-ilmu sosial di Indonesia, termasuk ilmu ekonomi, harus diakui belum cukup menggembirakan perkembangannya. Hal ini terutama disebabkan perguruan tinggi kita belum menjadi pusat-pusat penelitian, tetapi baru merupakan pusat-pusat pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Itu pun belum semuanya dan sepenuhnya mencapai mutu yang memuaskan.

Agar perguruan tinggi bisa menjadi pusat-pusat penelitian diperlukan persyaratan-persyaratan berat, antara lain berupa pembukaan dan pemberian peluang pengembangan karier peneliti. Pusat-pusat penelitian perlu diberi kesempatan mengangkat tenaga-tenaga peneliti yang bukan dosen (tenaga pengajar), dan selanjutnya disediakan dana-dana penelitian yang memadai. Pemerintah perlu secara serius mengembangkan iklim yang merangsang penelitian dan menerbitkan hasil-hasilnya, termasuk diantaranya konperensi-konperensi antar peneliti dari pusat-pusat penelitian dan fakultas.

DAFTAR PUSTAKA

- Boulding, Kenneth, (1970), *Economics as a Science*, McGraw-Hill.
- Garnauth, EG & McCawley, PT (ed), (1980), *Indonesia: Dualism Growth and Poverty*, ANU.
- Geertz, Clifford, (1988), "Recollections of an Itinerant Career", *BIES*, Vol.29 No. 3, Desember, hal. 42-43.

- Indonesian Economics: The Concept of Dualism in Theory and Policy, Selected Studies on Indonesia by Dutch Acholars, Van Hoeve, 1961.
- Kasryno, Faisal (ed), (1984), *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mangunwijaya J.B., (1991), "Daya Cipta Ilmu dan Teknologi dan Pertumbuhan di Indonesia", *Kongres Kebudayaan*, hal. 1.
- Mubyarto, (1980), *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*, YAE.
- _____, (ed), (1982), *Growth and Equity in Indonesian Agricultural Development*, YAE.
- _____, "Masyarakat Pedesaan Dewasa ini dan Tantangan Profesional Ilmu Ekonomi Pertanian", dalam Hendra Esmara (ed), (1987), *Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan: Kumpulan Esei untuk menghormati Sumitro Djojohadikusumo*, Gramedi.
- _____, (1987), *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, LP3ES.
- _____, dkk, (1991), *Etos Kerja dan Kohesi Sosial Masyarakat Sumba, Rote, Sabu dan Timor*, Propinsi NTT, Aditya Media.
- Scott, James, (1983), *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara* (terjemahan), LP3ES.
- Singaribun, Masri & Penny, D.H., *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa, Bharata*, 1976 (juga terbit dalam bahasa Inggris, *Population and Poverty in Rural Java. An Economic Arithmetic from Sriharjo*. Ithaca: Cornell International Agricultural Development, (1973).
- Wharton, C.R. (ed), (1969), *Subsistence Agriculture and Economic Development*. Chicago: Aldine Press.